

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Sabtu-Senin, 24-26 April 2021



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media online dan media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Liputan6.com	Sabtu, 24 April 2021	Proyek Jembatan Batam-Bintan Diminta Gunakan Skema KPBU	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong inovasi pembiayaan pembangunan Jembatan Batam-Bintan melalui skema kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk meningkatkan konektivitas antar pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus membuka peluang investasi bidang jalan dan jembatan. https://www.liputan6.com/bisnis/read/4540921/proyek-jembatan-batam-bintan-diminta-gunakan-skema-kpbu https://industri.kontan.co.id/news/pembiayaan-konstruksi-jembatan-batam-bintan-gunakan-skema-kpbu https://www.cnbcindonesia.com/news/20210425121606-4-240645/jokowi-jadi-bangun-jembatan-terpanjang-di-ri-ini-faktanya https://www.kompas.tv/article/168023/jembatan-batam-bintan-bakal-jadi-jembatan-terpanjang-di-ri
2	Kompas.com	Sabtu, 24 April 2021	444 Rumah Dibangun untuk Masyarakat Terdampak Proyek Bendungan Kuningan	Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun 444 rumah khusus (rusus) Tipe 28 di atas lahan seluas 9,49 hektar di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Dari jumlah tersebut, 419 rumah sedang dalam proses pembangunan dan 25 unit lainnya sudah tuntas dibangun. https://properti.kompas.com/read/2021/04/23/110716521/444-rumah-dibangun-untuk-masyarakat-terdampak-proyek-bendungan-kuningan https://www.suara.com/news/2021/04/23/111515/kementerian-pupr-bangun-rumah-untuk-warga-terdampak-bendungan-kuningan https://www.antaranews.com/berita/2121138/kementerian-pupr-buat-rumah-khusus-relokasi-dampak-bendungan-kuningan
3	Antaranews.com	Sabtu, 24 April 2021	Kementerian PUPR tata kawasan PKL untuk jadi sentra kuliner higienis	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Higienis di Jalan Raden Patah, Jakarta Selatan. Jalan ini terletak di belakang Kantor Pusat Kementerian PUPR yang menjadi salah satu kawasan kuliner kaki lima di Jakarta.

				https://www.antaranews.com/berita/2120986/kementerian-pupr-tata-kawasan-pkl-untuk-jadi-sentra-kuliner-higienis https://properti.kompas.com/read/2021/04/24/132733821/jalan-raden-patah-kebayoran-ditata-jadi-sentra-kuliner https://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2021/04/25/kementerian-pupr-akan-bangun-sentra-kuliner-higienis-di-jalan-raden-patah-kebayoran-jakarta
4	Bisnis.com	Sabtu, 24 April 2021	Akses Air Minum Provinsi Riau, Kementerian PUPR Dorong Proyek SPAM	Direktorat Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan aksesibilitas air minum di wilayah Riau saat ini masih rendah. Tercatat aksesibilitas air minum di Riau masih berada di angka 20 persen. Untuk meningkatkannya, Kementerian PUPR mendorong penyelesaian proyek SPAM regional. https://sumatra.bisnis.com/read/20210423/534/1385291/akses-air-minum-provinsi-riau-kementerian-pupr-dorong-proyek-spam
5	Tribunnews.com	Sabtu, 24 April 2021	Kementerian PUPR Tinjau Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Seksi 1 dan 5	Guna memastikan kesiapan pengoperasian Jalan Tol Balikpapan – Samarinda Seksi 1 dan Seksi 5, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian bersama Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Budi Harimawan serta Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Triono Junoasmono melakukan kunjungan kerja pada 21-22 April 2021. https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/04/24/penyelesaian-jalan-tol-balikpapan-samarinda-masih-terkendala-di-seksi-1-dan-5 https://monitor.co.id/2021/04/23/kementerian-pupr-tinjau-jalan-tol-balikpapan-samarinda-seksi-1-dan-5/
6	Kontan.co.id	Sabtu, 24 April 2021	Kementerian PUPR bangun 6.000 MCK di lembaga pendidikan agama dan pondok pesantren	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus membangun sarana prasarana air bersih dan sanitasi. Dukungan ini diberikan salah satunya melalui program padat karya tunai (PKT) penyediaan sarana dan prasarana sanitasi di pondok pesantren/lembaga pendidikan keagamaan (LPK). https://nasional.kontan.co.id/news/kementerian-pupr-bangun-6000-mck-di-lembaga-pendidikan-agama-dan-pondok-pesantren

7	Jubi.co.id	Sabtu, 24 April 2021	Dana padat karya Kementerian PUPR langsung dibagikan ke warga	Pemerintah Kota Jayapura, Provinsi Papua, mendapatkan dana Rp2 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui kegiatan padat karya Cash For Work. https://jubi.co.id/papua-dana-padat-karya-pupr-langsung-dibagikan-ke-warga/
8		Sabtu, 24 April 2021	Anggaran Mencapai Rp 34 Miliar, Pembangunan Masjid Nyak Sandang Aceh Ditargetkan Selesai Oktober 2021	Sebagai tindak lanjut atas usulan Nyak Sandang kepada Presiden Joko Widodo pada pertemuan Maret 2018 lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan pembangunan Masjid Nyak Sandang di Lamno, Kabupaten Aceh Jaya. https://www.medcom.id/properti/arsitekturn/xkEyBeek-masjid-nyak-sandang-aceh-rampung-oktober-2021?utm_source=all&utm_medium=allfeed&utm_campaign=allpartnership https://www.industry.co.id/read/84735/anggaran-mencapai-rp-34-miliar-pembangunan-masjid-nyak-sandang-aceh-ditargetkan-selesai-oktober-2021 https://aceh.tribunnews.com/2021/04/25/masjid-nyak-sandang-berkonsep-modern-ditargetkan-rampung-oktober-2021 http://bisniscorner.com/2021/04/24/penghargaan-kepada-penyumbang-pesawat-ri-pertama-kementerian-pupr-targetkan-pembangunan-masjid-nyak-sandang-aceh-selesai-oktober-2021/

Judul	Transaksi di Atas Tanah HGB Mesti Melindungi Publik	Tanggal	24 April 2021
Media	Kompas, Halaman 10		
Resume	Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Diana Kusumastuti, Jumat (23/4/2021), mengatakan, pengaturan soal HGB merupakan wilayah tata ruang. Namun, pihaknya berpendapat, dalam konteks perlindungan publik terhadap praktik penjualan aset bangunan di atas HGB yang mengharuskan ada perpanjangan atau bahkan perpanjangannya terbatas, regulasi ini diperlukan.		

REGULASI PERTANAHAN

Transaksi di Atas Tanah HGB Mesti Melindungi Publik

JAKARTA, KOMPAS — Hak guna bangunan memiliki batasan jangka waktu pemberian dan perpanjangan. Terkait hal tersebut, dinilai perlu ada pengaturan tegas praktik jual beli bangunan dan/atau unit bangunan yang berdiri di atas tanah hak guna bangunan. Langkah ini dibutuhkan demi melindungi publik.

Pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri tentang Hak atas Tanah sebagai bagian dari aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Draft aturan itu, antara lain, mengatur hak guna bangunan (HGB) diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun, diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun, dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun.

Dalam draft itu juga disebutkan, setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan pembaruan berakhir atau tidak dimohonkan perpanjangan dan/atau pembaruan hak paling lama 2 tahun setelah berakhirnya hak atau perpanjangannya, tanah HGB kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara, tanah hak pengelolaan, atau tanah hak milik.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Diana Kusumastuti, Jumat (23/4/2021), mengatakan, pengaturan soal HGB merupakan wilayah tata ruang. Namun, pihaknya berpendapat, dalam konteks perlindungan publik terhadap praktik penjualan aset bangunan di atas HGB yang mengharuskan ada perpanjangan atau bahkan perpanjangannya terbatas, regulasi ini diperlukan.

Artinya, perlu ada aturan tegas dalam praktik jual beli bangunan dan/atau unit pada bangunan di atas HGB yang mewajibkan penjual memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada pembeli perihal batas waktu HGB dan konsekuensinya. Perhitungan nilai jual aset bangunan di atas HGB harus berbeda dengan praktik jual beli pada tanah sertifikat hak milik (SHM).

"Penjual wajib memasukkan komponen umur sisa terhadap harga jual bangunannya. Jadi, konsumen membayar harga yang wajar untuk bangunan pada HGB dengan umur terbatas

yang memerlukan perpanjangan atau yang perpanjangannya juga terbatas," ujarnya di Jakarta.

Diana mencontohkan, bangunan publik itu misalnya rumah susun (rusun) komersial. Selain HGB dan kewajiban penjual memberikan informasi yang benar kepada pembeli, sebenarnya diperlukan juga aturan tentang iuran yang dapat dipergunakan jika jatuh tempo untuk perpanjangan HGB.

Pertimbangan investor

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Sanny Iskandar ketika dihubungi menuturkan, kepastian hak atas tanah dan jangka waktunya memang dibutuhkan. Tujuannya adalah meyakinkan orang dapat menjalankan usahanya di tanah atau bangunan itu secara jangka panjang.

HKI menilai hak atas tanah merupakan jaminan kepastian hukum bagi kegiatan investasi. Jaminan kepastian ini menjadi pertimbangan utama bagi para investor, khususnya di bidang industri manufaktur, dalam menanamkan modal.

Terkait HGB, Sanny mengatakan, UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria membatasi pemberian HGB untuk 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun. Kemudian dalam regulasi terbaru, perpanjangan itu dimungkinkan lebih lama.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah mengatur, HGB di atas tanah negara dan tanah hak pengelolaan (HPL) diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun, diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun, dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun.

"Setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan pembaruan berakhir, artinya setelah 80 tahun, tanah HGB kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah hak pengelolaan. HKI mengusulkan agar HGB dapat diberikan 80 tahun di muka," ujarnya.

Menurut Sanny, sesuai PP No 18/2021, penataan kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara tersebut



Foto udara proyek pembangunan apartemen Nuansa Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Jumat (19/3/2021). Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Regulasi itu mengatur hak guna bangunan (HGB) di atas tanah negara dan tanah hak pengelolaan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun, diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun, dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Jika perpanjangan HGB tidak dilakukan, tanah HGB dapat dikuasai negara untuk dikelola.

menjadi kewenangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Atas kewenangan menteri terkait, tanah tersebut dapat diberikan prioritas kepada pemegang hak sebelumnya.

Namun, hal itu perlu mempertimbangan beberapa hal. Pertama, tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak. Kedua, syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak.

Ketiga, pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak dan tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang, tidak dipergunakan dan/atau direncanakan untuk kepentingan umum. Hal yang juga diperhatikan adalah sumber daya alam, lingkungan hidup, serta keadaan tanah dan masyarakat sekitar.

"Dari sisi pelaku usaha, kalau dituntut tetap menjalankan kegiatan usaha sesuai peruntukannya, itu sih enggak masalah. Kami siap. Namun, dari sisi pemerintah, mestinya juga tidak mengubah," kata Sanny.

Sanny juga menyebutkan, ada persoalan lain terkait mekanisme dan fleksibilitas jangka waktu. Contohnya, HGB induk diterbitkan pada 1995 dan akan

baru sehingga menyulitkan konsumen. Prosedur panjang dan biaya tinggi dalam perpanjangan status tanah HGB rusun dinilai menjadi bumerang bagi pasar apartemen di Tanah Air. "Pasar apartemen akan sulit menerima sehingga dikhawatirkan pasar apartemen tidak akan menarik lagi," katanya.

Tetap buka opsi

Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Himawan Arief Sugoto mengatakan, siklus kepemilikan rumah susun di atas tanah HGB mencapai 80 tahun. Sewaktu status tanah HGB itu berakhir, kondisi tata ruang dan perkotaan pada saat itu kemungkinan juga sudah berubah.

Kendati begitu, negara tetap membuka opsi perpanjangan bagi masa HGB yang sudah habis. Prosedur dan biaya perpanjangan HGB rusun masih sama dengan mekanisme perpanjangan yang saat ini telah berjalan. Akan tetapi, jika perpanjangan HGB tidak dilakukan, tanah HGB rusun dapat dikuasai negara untuk dikelola, sedangkan pemegang hak satuan rusun akan ditata.

Tanah HGB rumah susun yang dikuasai negara dapat berstatus menjadi tanah hak pengelolaan (HPL) melalui mekanisme bank tanah. Peruntukan lahan HPL yang dikelola negara itu akan diatur ulang sesuai kebutuhan dan perkembangan kondisi tata ruang wilayah.

"Pemerintah akan mengatur peruntukan lahan HPL. Apabila tidak ada perubahan dalam tata ruang wilayah dan kondisi bangunan masih baik, para pemegang hak satuan rusun bisa mendapatkan prioritas (kepemilikan) lagi," kata Himawan.

Ia menegaskan, pengaturan perpanjangan lahan HGB atau pengalihan HGB menjadi HPL merupakan bagian dari upaya pemerintah menata pertanahan nasional. Di sisi lain, pemerintah memberikan kemudahan perpanjangan HGB langsung hingga 50 tahun dengan persyaratan sudah mengantongi sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Peralihan HGB ke HPL juga akan dimudahkan dari sisi tarif. Pengaturan dan penataan tanah itu diharapkan mendorong iklim investasi. (LKT/CAS)

Judul	Berita Foto - PROGRES CISUMDAWU	Tanggal	26 April 2021
Media	Bisnis Indonesia, Halaman 19		
Resume	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat optimis bisa menyelesaikan konstruksi jalan tol Cisumdawu pada akhir tahun ini. Saat ini pembangunan jalan tol tersebut masih terhalang masalah pembebasan lahan. Untuk itu, Kementerian PUPR meminta agar seluruh pihak terus berkoordinasi dan berupaya keras untuk mempercepat pembebasan lahan		

■ PROGRES CISUMDAWU



Bisnis/Rachman

Foto udara proyek pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) di kawasan Sumedang kota, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, belum lama ini. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat optimis bisa menyelesaikan konstruksi jalan tol

Cisumdawu pada akhir tahun ini. Saat ini pembangunan jalan tol tersebut masih terhalang masalah pembebasan lahan. Untuk itu, Kementerian PUPR meminta agar seluruh pihak terus berkoordinasi dan berupaya keras untuk mempercepat pembebasan lahan.